

Pengambilan Keputusan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN): Analisis Perspektif Masyarakat di Luar Daerah Kalimantan Ditinjau dari Aspek Kemanusiaan

Aulia Aningtyas¹, Sabrina Ika Ayu Wardhani², Aura Fawwaz Iesmana³, Faradina Izza Hamida⁴

¹ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya Malang, auliaaningtyas@student.ub.ac.id

² Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya Malang, sabrinamei406@student.ub.ac.id

³ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya Malang, aurafawwaz@student.ub.ac.id

⁴ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya Malang, faradinaizza@student.ub.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Des, 2024

Revised Des, 2024

Accepted Des, 2024

Kata Kunci:

IKN, Kemanusiaan, Perspektif Masyarakat

Keywords:

Humanity, IKN, Societal Perspective

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai proyek strategis nasional menandai babak baru dalam sejarah pembangunan Indonesia. Namun, di balik ambisi besar mewujudkan ibu kota masa depan, terdapat kekhawatiran mendalam mengenai dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan. Penelitian ini secara khusus menggali sejauh mana prinsip-prinsip kemanusiaan telah menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek IKN. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang disebar kepada masyarakat sekitar, terkhusus luar daerah Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan aspek kemanusiaan, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat dimensi kemanusiaan dalam pembangunan proyek besar seperti IKN, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

ABSTRACT

The development of the National Capital City (IKN) as a national strategic project marks a new chapter in the history of Indonesia's development. However, behind the grand ambition of realizing the capital of the future, there are deep concerns regarding the social and humanitarian impacts that may arise. This research specifically explores the extent to which humanitarian principles have been a primary consideration at every stage of the planning and implementation of the IKN project. Through quantitative and qualitative methods, this study analyzes data obtained from interviews and questionnaires distributed to the surrounding community, particularly outside the Kalimantan region. The research results show that although there have been efforts to integrate humanitarian aspects, there are still a number of significant challenges. The findings of this research highlight the importance of strengthening the humanitarian dimension in the development of large projects such as the IKN, as well as providing policy recommendations to ensure that the development of the IKN is not only focused on economic growth but also on the overall well-being of the community.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Aulia Aningtyas

Institution: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya Malang

Email: auliaaningtyas@student.ub.ac.id

1. PENDAHULUAN

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan sebuah proyek ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Gagasan pemindahan ibu kota ini telah muncul sejak era Presiden Soekarno, namun baru terealisasi secara konkrit pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. IKN yang secara resmi ditetapkan sebagai nama ibu kota baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, merupakan manifestasi dari visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Pembangunan IKN diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah terlalu padat, serta membuka peluang investasi baru di wilayah Kalimantan. Rencana pembangunan IKN mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan, hingga pengembangan kawasan hijau dan teknologi cerdas. Pemindahan ibu kota negara ini tentu saja memiliki implikasi yang luas, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial-budaya. Dari sisi ekonomi, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan dan sekitarnya. Proyek infrastruktur berskala besar yang menyertai pembangunan IKN akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Disisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai potensi terjadinya inflasi dan kenaikan harga tanah di wilayah sekitar IKN. Namun hal ini tidak terlalu signifikan karena diperkirakan pembangunan IKN terhadap penduduk setempat akan mendapatkan manfaat dari proyek besar ini, seperti infrastruktur, sektor manufaktur yang sukses dan lapangan pekerjaan baru (Aprillia & Supentri, 2024).

Selain dampak ekonomi, dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, juga menjadi perhatian utama. Beberapa kelompok masyarakat adat di Kalimantan telah menyatakan kekhawatiran terkait dengan potensi pengusuran, kehilangan akses terhadap sumber daya alam, dan terkikisnya nilai-nilai budaya mereka akibat pembangunan IKN. Pembangunan tersebut harus mengedepankan kepentingan rakyat banyak, baik dalam hal kesejahteraan maupun dalam kesempatan untuk berkontribusi secara luas (Firnaherera & Lazuardi, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN agar hak-hak mereka terlindungi. Bagi masyarakat di luar daerah Kalimantan, pembangunan IKN memiliki makna yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat mungkin menyambut baik pembangunan IKN sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata. Namun, sebagian lainnya mungkin skeptis dan khawatir mengenai biaya pembangunan yang besar dan potensi terjadinya korupsi. Dari perspektif kemanusiaan, pembangunan IKN harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Hofifah (2022), Pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat demi terciptanya keadilan dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD. Hal ini juga sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pembangunan IKN harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Penelitian yang berjudul "Pengambilan Keputusan Pembangunan Ibu Kota Negara IKN: Analisis Perspektif Masyarakat di Luar Daerah Kalimantan Ditinjau dari Aspek Kemanusiaan"

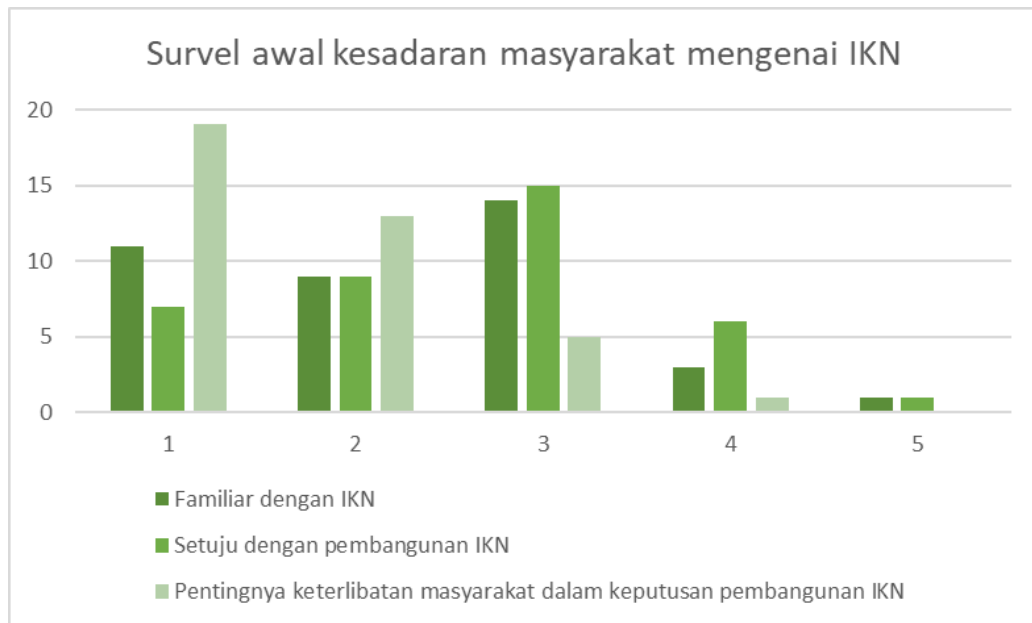
bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat di luar Kalimantan memandang pemindahan ibu kota dan dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 November-3 Desember 2024 di wilayah sekitar terkhusus luar daerah Kalimantan. Metode yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan informasi pada penelitian ini adalah metode campuran (*mixed method*). Penelitian ini adalah langkah menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian *mixed method* merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, mengintegrasikan dua bentuk data, dan menggunakan desain berbeda yang dapat melibatkan asumsi filosofis dan kerangka teoritis (Creswell, 2010). Peneliti menggunakan metode kuantitatif berupa kuesioner untuk mengambil data dengan sampel minimal 30 responden luar daerah Kalimantan serta metode kualitatif berupa wawancara dengan sampel minimal 3 narasumber yang berasal dari luar daerah Kalimantan. Kuesioner terdiri dari pertanyaan berskala likert dengan menggunakan skala 1-5, dimana 1 merujuk pada hasil positif dan 5 merujuk pada hasil negatif. Untuk mengukur sikap responden terhadap berbagai aspek IKN, seperti manfaat dan tantangan yang dihadapi. Peneliti juga menyediakan pertanyaan esai untuk menggali pandangan mendalam responden mengenai pembangunan IKN sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih luas. Selanjutnya, data yang telah diperoleh peneliti akan dianalisis dan dideskripsikan untuk mengetahui informasi secara faktual, akurat, dan sistematis sesuai fenomena yang diteliti oleh peneliti. Peneliti juga menggunakan data sekunder untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian kuantitatif didapat dari jurnal maupun buku penelitian terdahulu dan teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian kualitatif didapat melalui observasi secara online, wawancara, dan studi dokumentasi foto dan video. Karakteristik responden menggunakan variabel bebas dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan agama terkecuali peneliti mengambil sampel orang luar daerah Kalimantan sebagai variabel terkontrol pada penelitian ini.

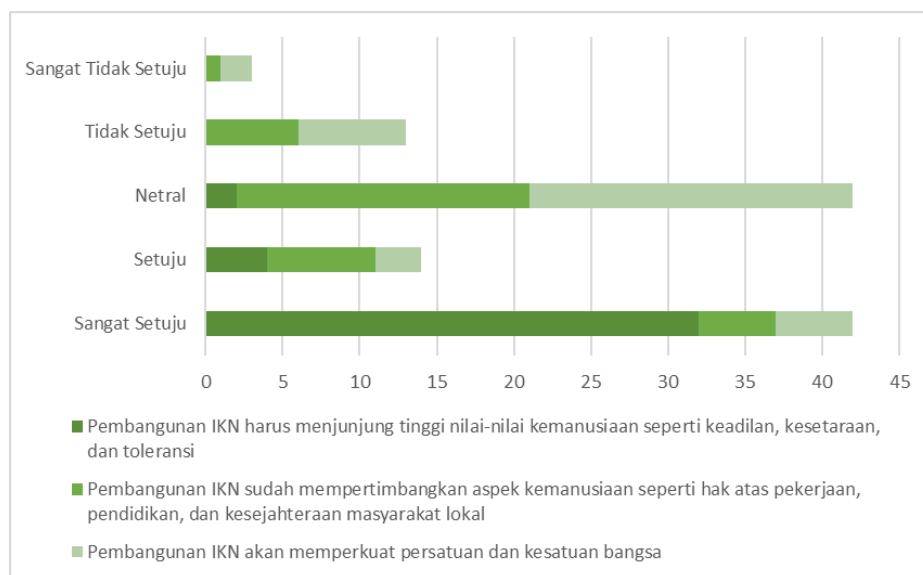
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan mengambil 38 sampel dan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai perspektif masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara (IKN). Analisis data yang dilakukan mengungkap berbagai temuan menarik terkait dengan tingkat dukungan, kekhawatiran, serta harapan masyarakat terhadap proyek besar ini, terutama dalam konteks kemanusiaan. Untuk mengetahui lebih jauh, berikut beberapa grafik yang menggambarkan perspektif masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam aspek kemanusiaan.



Gambar 1. Grafik kesadaran masyarakat mengenai IKN

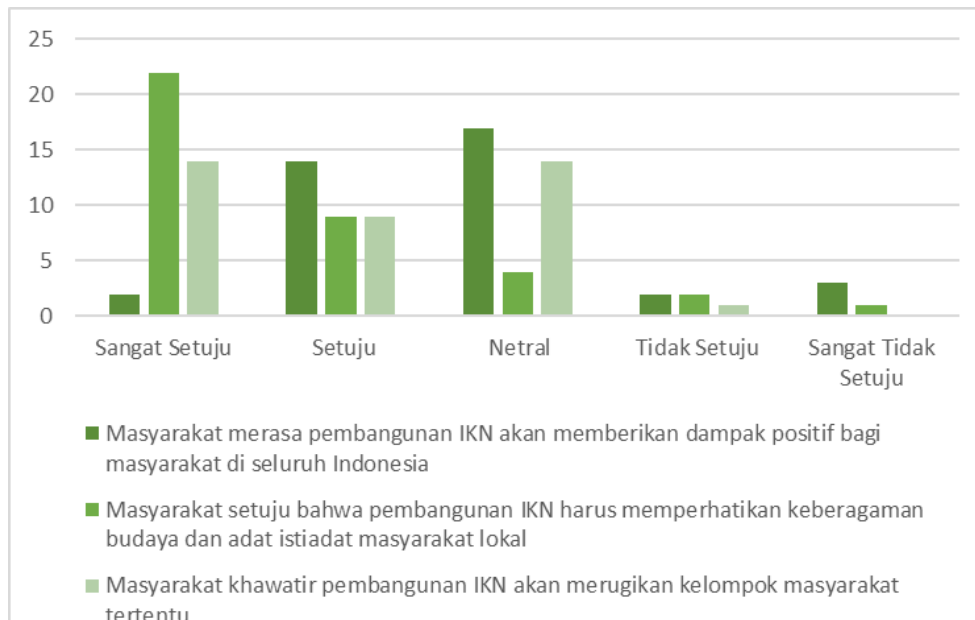
Hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar responden cukup memahami rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap rencana ini terbelah, dengan tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan yang hampir seimbang. Hal yang menarik adalah, mayoritas responden sangat menghargai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan IKN. Ini mengindikasikan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan besar-besaran ini.



Gambar 2. Grafik nilai-nilai kemanusiaan dalam IKN

Selanjutnya, Berdasarkan hasil survei yang ditunjukkan oleh ketiga grafik tersebut, mayoritas responden atau sekitar 84,2% sangat setuju bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Hal ini menunjukkan masyarakat menyadari pentingnya menjaga keberagaman budaya dan adat istiadat dalam pembangunan IKN. Namun, ketika ditanya apakah pembangunan IKN sudah

mempertimbangkan aspek kemanusiaan seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat lokal, terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Sekitar setengah (50%) responden berpendapat bahwa aspek-aspek tersebut sudah dipertimbangkan, sementara sisanya memiliki pandangan yang berbeda. Terakhir, sekitar 55,3% responden memilih netral bahwa pembangunan IKN akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat masih ragu terhadap proyek pembangunan besar tersebut.



Gambar 3. Grafik dampak bagi masyarakat Indonesia

Berdasarkan ketiga grafik yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat persepsi yang beragam mengenai dampak positif pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap masyarakat Indonesia. Pertama, grafik yang terkait dampak positif IKN bagi seluruh masyarakat Indonesia, terdapat kecenderungan optimisme yang cukup netral, sekitar 44,7% atau 17 responden dari total keseluruhan. Hal ini mengindikasikan masih adanya kontra bahwa pemindahan ibu kota akan membawa pertumbuhan yang positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, mayoritas responden (57,9%) sangat setuju bahwa pembangunan IKN harus memperhatikan keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan kesadaran pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan besar seperti ini. Keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan dan diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Ketiga, ditemukan adanya persepsi yang cukup terpolarisasi terkait kekhawatiran akan dampak negatif pembangunan IKN terhadap kelompok masyarakat tertentu. Terdapat kesamaan jumlah responden yang memilih opsi sangat setuju dan cukup setuju atau netral, masing-masing sebesar 36,8%. Hal ini mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang memiliki kekhawatiran signifikan terhadap potensi dampak negatif pembangunan IKN, seperti penggusuran, kesenjangan sosial, atau dampak lingkungan. Di sisi lain, terdapat pula kelompok masyarakat yang netral atau cukup khawatir dengan potensi dampak pada kelompok masyarakat tertentu.

Hasil survei tidak hanya berhenti pada data visual, namun juga menyajikan beragam pandangan responden mengenai sejauh mana pemerintah telah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, terutama aspek kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan IKN. Komentar-komentar yang beragam ini memberikan gambaran yang lebih kaya tentang persepsi publik terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proyek strategis nasional tersebut. Misalnya salah satu responden menyatakan, "Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai efektivitas dan dampak sosial dari proyek tersebut, pemerintah menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Namun, beberapa kritik mengungkapkan bahwa tidak semua aspek nilai Pancasila telah terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan yang diterapkan." Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai simbol persatuan bangsa dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam skala besar. Namun, seberapa efektif upaya ini dalam mewujudkan tujuan tersebut masih perlu diuji dalam jangka panjang.

Selanjutnya komentar yang disoroti mengenai pandangan masyarakat terhadap apakah pemerintah telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN adalah tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai pancasila. Hasil respon menyatakan masih ada celah antara idealisme pancasila dan realita implementasinya, terutama dalam aspek keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, dan lingkungan keberlanjutan. Dalam aspek kemanusiaan dan keadilan sosial masih perlu diperkuat, terutama terkait dampak terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Secara singkat, komentar ini menyoroti adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan praktik pembangunan IKN yang sebenarnya. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan aspek keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan dalam proyek besar ini.

4. KESIMPULAN

Isu pembangunan IKN saat ini menuai banyak respons Pro dan Kontra dalam masyarakat. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 26 November-3 Desember 2024 memperoleh beberapa respon dari masyarakat terkhusus masyarakat yang tinggal diluar daerah Kalimantan bahwa pendapat mereka hampir seimbang dalam pandangan pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh pemerintah. Beberapa responden setuju dan sebagian dari responden tidak setuju terhadap pembangunan tersebut. Dalam penelitian ini mayoritas responden lebih menghargai jika masyarakat dilibatkan dalam keputusan pembangunan IKN. Hal ini membuktikan adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dan turut serta dalam pembangunan besar-besaran untuk mencapai Indonesia maju. Sebanyak 84,2% responden setuju dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan toleransi yang telah tercantum dalam ideologi Indonesia yaitu Pancasila sila ke 2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Pada penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa responden masih ragu akan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi responden mempunyai harapan yang tinggi pada proyek pembangunan IKN. Mayoritas responden memiliki kekhawatiran akan hilangnya adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal di daerah proyek pembangunan IKN, Kalimantan Timur. Kekhawatiran juga meliputi dampak negatif dari pembangunan tersebut yang akan mempengaruhi pengrusakan, kesenjangan sosial, serta dampak lingkungan yang dialami masyarakat karena proyek IKN yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kekhawatiran tidak bisa dihindari oleh masyarakat oleh sebab itu pembangunan IKN tersebut harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila untuk meminimalisir adanya dampak negatif yang berimbas ke masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella, Y., Basyiroh, A., Syarifuddin, M., & Haqiqi, A. (2024). Pandangan Mahasiswa Universitas Brawijaya Mengenai Wajah Baru Ibukota Indonesia Terhadap Nilai Pancasila. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 141–147. <https://doi.org/10.58812/sish.v1.i03>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (H. Salmon, A. Marks, C. Neve, & D. C. Felts, Eds.; fifth). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Delvi Aprillia, & Supentri. (2024). Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 376–384. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.285>
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Nainggolan, E. U. (2022, January 22). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. *Article*, 1–1. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>
- Uin, H., & Yogyakarta, S. K. (2022). *Proteksi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. 16(2), 107–121. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i2.18275>
- Valentina, A., Elsera, M., Raja, M., & Haji, A. (2023). Analisis Ketahanan Sosial Masyarakat “Nusantara” Dalam Pembangunan Ibukota Negara. *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)*, 9(1), 2023. <http://jsa.fisip.unand.ac.id>